

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹ Dan Juga Pembangunan ekonomi Pemerintahan Daerah merupakan salahsatu indikator keberhasilan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.²

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia³. Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama,

¹ Emialus jaa Sulistyو “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa Terhadap Pembangunan desa” *Riset Mahasiswa Akuntansi* 7 No 1 (April,2019), 1.

² Adi Yanto, Aqrif “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhaap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa” *Economy Deposit Jurnal* 2, No 2 (Desember,2020),64.

³ Lukman Adi Santoso, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta Pusat: Kementrian Keuangan Republik Indonesia,2019),1.

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁴

APBDes merupakan rencana keuangan desa satu tahun yang mencakup pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan desa. Banyaknya APBDes dapat memfasilitasi terjadinya kecurangan Rincian kasus korupsi sektor per semester yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* semester I tahun 2021. dana desa berada di posisi pertama dengan kasus sebanyak 55. Namun, kerugian yang ditimbulkan tidak sebanyak kasus korupsi pada sektor pertanahan. Selain dana desa, ICW juga memantau sektor pemerintah desa lainnya, seperti alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Banyaknya kasus korupsi terkait pengelolaan dana tersebut berarti bahwa sistem pengelolaan keuangan desa yang diterapkan masih mempunyai banyak kekurangan, sehingga dibutuhkan adanya upaya pencegahan *fraud* (Kecurangan) agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan kasus kecurangan.⁵

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan Desa, dengan adanya manusia yang berkualitas dapat mencegah terjadinya kompetensi sumber daya keterlambatan dalam melakukan pekerjaan atau dalam proses penyusunan laporan keuangan selain waktu yang digunakan juga bisa di hemat⁶, karena sudah adanya pemahaman tentang apa

⁴ Matia Andriani "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa" *Jurnal Keuangan* (2019):2

⁵ Gharin Eka Ferdianti "Faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan APBDES di kecamatan Prambon" *Equilibrium* jurnal 11 No.2 (2022):28

⁶ Made Hangga Hariawan "Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Whistleblowing System, Moraliats Individu Terhadap Pencegahan Kencenderungan Dalam Pengelolaan Dana desa" *jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, (Juli 2020), 58.

yang dikerjakan.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat di pertanggung jawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban *steward* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut.

Berikut adalah hadist yang berkaitan dengan akuntabilitas yaitu hadist riwayat imam ahmad yang berbunyi:

مَا خَطَبْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أمانةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inti penjelasan dari hadits tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”. Sehingga dapat dikatakan, ketika seorang pemimpin telah diberikan amanah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan maka ia harus jujur, tanggung jawab, tepat janji, tegas. Apabila seorang pemimpin tidak bisa melaksanakan sifat tersebut maka ia sama dengan orang yang tidak memiliki iman dan tidak memiliki agama.⁷

Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), dua dana ini ditemukan apabila sedang membahas tentang tata kelola desa. Meski mirip dalam hal nama, dana desa berbeda dengan alokasi dana desa sebagai orang mungkin memahami bahwa ADD merupakan nominal dari DD dialokasikan oleh desa. Namun DD dan ADD sungguh berbeda dalam berbagai aspek mulai aspek sumber dana dimana DD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan untuk desa. Sedangkan ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkatan 1, dana didapatkan dari 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH), maka dalam kata

⁷ Dwi Ulan Giriani “Pengaruh transparansi laporan keuangan, akuntabilitas terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa” *Jurnal ekonomi* vol 1 No 2 (Jakarta, 2022),5

lain, DD menjadi kewajiban dari pemerintah pusat sedangkan ADD merupakan Wewenang dari Pemerintah Daerah. Aspek selanjutnya yaitu aspek penyaluran dana desa dan alokasi dana desa, pada DD yang bersumber dari APBN kemudian ditranfer melalui APBD Kabupaten/kota melalui rekening kas umum daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara, untuk kemudian diteruskan secara langsung ke desa-desa melalui rekening kas desa (RKD), sedangkan ADD yang merupakan kewajiban pemerintah daerah di alokasikan melalui dana perimbangan dan di salurkan ke RKD.⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.⁹

Batang-batang adalah kecamatan yang ada di kabupaten sumenep provinsi jawa timur, Indonesia. Daerah ini terletak di madura. Kecamatan batang-batang memiliki 16 desa yaitu: Banuaju Barat, banuaju timur, batang-batang daya, batang-

⁸ Simpeldesa, *Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa* (04 Juni 2022),20.

⁹ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6,(Januari 2019),12.

batang laok, bilangan, dapenda, jangkok, jenangger, kolpo, lenggung barat, lenggung timur, lombang, nyabakan barat, nyabakan timur, tamidung, toosan. Dan berikut adalah anggaran alokasi dana desa di kecamatan batang-batang-batang selama 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 1.1
Anggaran Alokasi Dana Desa
Kecamatan Batang-Batang
2021-2022

No	Kecamatan	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	Batang-Batang	2021	9,764,000,000	9,764,000,000
2	Batang-Batang	2022	15,935,250,000	15,935,250,000

Sumber: Baliho yang di publikasi

Berdasarkan tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwasannya alokasi dana desa kecamatan batang-batang bertambah dari tahun. Dan dana tersebut digunakan sesuai dengan kebijakan pemerintah desa yang telah disebutkan sebelumnya guna mempercepat pembangunan desa serta memberdayakan masyarakat di kecamatan batang-batang.

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa yaitu aparat pemerintah desa. Berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 43 tahun 2014 tentang aparatur desa yang menyatakan bahwa pemerintahan desa yaitu kepala desa atau yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki

kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan relative rendah. Fenomena yang terjadi pada alokasi penelitian adalah rendahnya kompetensi aparatur desa di indikasikan atau dapat dilihat dengan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti kurang mampu mengoperasikan alat elektronik, kurang pengalaman dibidangnya, kurang paham dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan. Yang mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah desa kurang baik/bagus kepada masyarakat, permasalahan yang sering terjadi adalah ketika masyarakat hendak mengurus surat-surat kependudukan, surat -surat tanah, keterangan lahir dan lain sebagainya, dimana waktu untuk melakukan pengurusan surat-surat diatas yang cukup lama. Kondisi ini hampir terjadi di semua desa yang ada di Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Hal itu karena faktor di antaranya kemampuan yang di memiliki aparatur desa itu sendiri, seperti tingkat pendididkan formal, pelatihan/keterampilan atau Pendidikan informal, pengalaman dan sikap dalam dalam menjalankan tugasnya yang masih kurang berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu ini merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauh mana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri.

Agar mencapai tujuan organisasi, maka aparat yang yang ada di kantor kecamatan batang-batang sebaiknya memiliki keahlian yang cukup baik dalam memenuhi kewajibannya dan keahliannya untuk menjalankan tugasnya dengan baik, melayani dan memenuhi kebutuhan aparat pemerintah desa ataupun petugas yang mengusai bidangnya dan bertanggung jawab para manajer dan pimpinan

dalam meningkatkan kualitas pegawainya dengan melakukan program pengembangan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, baik itu dengan melalui pemerintah Pendidikan dan pelatihan guna menciptakan kinerja yang baik.

Menurut aturan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa (APBDes) termasuk dana desa itu mestinya di umumkan atau sebaiknya di pampang secara terbuka di tempat yang mudah dilihat agar diketahui oleh masyarakat sekitar. Namun kenyataannya tidak seperti itu maka dibutuhkan adanya kerjasama antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat, agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam bidang administrasi yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan desa. Ada beberapa desa yang ada di Kecamatan Batang-Batang yang tidak mempublikasi secara terbuka seperti desa Tamidung, Legung Timur dan Kolpo sehingga berdampak terhadap perkembangan desa.

Adapun penelitian yang di lakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anam masruhin (2019) dengan judul “Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi Empiris pada perangkat desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”. Penelitian yang dilakukan di 16 desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo. Sampel dalam studi ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa (kepala urusan keuangan), dan kepala urusan sebanyak 80 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu diperoleh bahwa nilai adjusted R square adalah 93,9%. Ini berarti

pengelolaan dana desa dapat diprediksi dari variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran. Sedangkan 6,1% dipengaruhi oleh variabel lain.¹⁰

Penelitian yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang) di lakukan pada tahun 2021, dari hasil peneitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan pada Kecamatan Namorambe di Kabupaten Deli serdang dan partisipasi masyarakat juga berpengaruh secara signifikan pada Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli serdang.

Berdasarkan latar belakang dari fenomena di atas, penelitian mengangkat judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partispasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah Kompetensi Apatur Desa berpengaruh Terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
2. Apakah Partisipasi masyarakat berpengaruh Terhadap Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara

¹⁰ Anam Masruhin "Pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran" *jurnal ekonomi*, Vol 1, No 1 (Mei 2021), 21.

simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparaut desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparaut desa dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana memperluas serta menambah referensi mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa agar diperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.

- b. Bagi IAIN Madura

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan tambahan kepustakaan atau sebagai referensi bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Khususnya Program Studi Akuntansi Syari'ah apabila ingin melakukan penelitian yang sama.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan tambahan konsep serta dijadikan acuan dan bahan kajian dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Aparatur Desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar motivasi untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan bagi aparatur desa dalam kebijakn dalam sebuah pengambilan keputusan yang baik bagi desa.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah serta dapat dijadikan bahan pertimbangan masyarakat pada saat pemilihan aparatur desa yang baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ada tiga variable yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu kompetensi apatur desa (X1), dimana memiliki tolok ukur yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan, pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang tertentu.¹¹

¹¹ Madhalena Giriani '' Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batujajar'' *junal*

2. Keahlian teknis, kompetensi aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.¹²
3. Pelatihan, aparatur desa diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan.¹³

Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independent (X2), juga memiliki tolok ukur yaitu yaitu sebagai berikut: ¹⁴

1. Keterlibatan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Kemampuan masyarakat dalam proses, masyarakat mampu dalam terlibat saat proses terjadinya partisipasi, ini juga berarti masyarakat harus memiliki kemampuan atau keahlian pada saat terlibat dalam partisipasi.
3. Adanya akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan.¹⁵

Akuntabilitas pengelolaan sebagai variabel dependen (Y), dimana memiliki tolok ukur yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa¹⁶

akuntansi vol. 1 no. 3 (2021), 17.

¹² Ratna Sari Dewi “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” *Jurnal Bisnis Analisis* Vol 1 No 2 (2021), 28.

¹³ Ibid 28

¹⁴ Sarah Agustina “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa” *Jurnal Ekonomi* Vol 1. No 3 (2022) 34

¹⁵ Rada Ratna Sari “pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ *Jurnal ekonomi* Vol 2 No 4 (2023) 22

¹⁶ Dawatuna “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” *Jurnal Komunitas* Vol 4 No 2 (2022)20

2. Timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintah desa.¹⁷
3. Berkurangnya kasus KKN didalam lingkungan pemerintah desa.¹⁸

Agar variabel yang menjadi fokus tersebut tidak meluas, maka perlu adanya batasan terhadap materi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini (Pengaruh kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (Studi Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep).

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian yang kebenarannya telah diterima oleh peneliti. Fungsi adanya asumsi penelitian adalah sebagai landasan berfikir serta berperan dalam melakukan penelitian, untuk mempertegas variabel yang diteliti, serta menentukan dan merumuskan hipotesis. Adapun asumsi dasar pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa dapat menentukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
2. Partisipasi masyarakat dapat menentukan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa

¹⁷ Uni Gede Sulindawati “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa Jurnal akuntansi (2023) Vol 3 No 2. 16

¹⁸ Ibid, 16

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban semesta atas pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dikatakan suatu kesimpulan yang masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian.

1. H1: Kompetensi apatur desa secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. H2: Partisipasi masyarakat secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa
3. H3: Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dan desa.

H. Definisi Istilah

Adanya definisi istilah ini guna menghindari perbedaan penerangan atau ketidakjelasan makna pada penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang mana harus didefinisikan atau diterjemahkan guna dapat memahami istilah yang ada dalam penelitian ini. Dan dapat memperoleh pemahaman yang sejalan dengan penulis. Dalam penelitian ini terdapat 3 (Tiga) istilah yaitu:

1. Kompetensi aparatur desa adalah keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh apatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan dan perilaku dalam pengembangan

pembangunan yang optimal.¹⁹

2. Partisipasi partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.²⁰
3. Akuntabilitas Pengelolaan adalah kewajiban memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban.²¹

I. Kajian Penelitian terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan berbagai penelaahan terhadap penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya plagiasi. Sehingga tidak terjadinya pembahasan yang sama dengan penelitian lainnya. Adapun tabel penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

¹⁹ Gakuh Maharani “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa “ *Jurnal ekonomi* Vol 1 No 2 (2020) 22

²⁰ Daramilata Kaehe Dkk “*Partisipasi masyarakat dalam perencanaan di kampung pintareng kecamatan tambukan selatan tenggara*” 15

²¹ “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa “ *Jurnal Akuntansi* Vol 6 No 1 (2021). 33

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dila Aulia, Ris mawati Sudirman ,Hapid (2021)	Pengaruh Kompetensi Aparatur desa, Partispasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menyimpulkan hasil analisis kompetensi aparatur desa adalah ($0,0665 > 0,05$), mengindikasikan bahwa kompetensi apatur desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi masyarakat memiliki nilai ($0,001 < 0,05$) mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.	Memiliki persamaan pada sumber data sama-sama menggunakan data primer dan Teknik Penelitaian sama -sama menggunakan teknik analisis deskriptif, uji kualitas data uji asumsi dan uji hipotesis.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada Teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara dan uji kredibilitas .
2	Gede putra Adnyana (2022)	Pengaruh Kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap	Hasil penelitian menyimpulkan hasil analisi pada kompetensi perangkat desa sebesar ($0,153 > 0,05$), mengindikasikan bahwa	Memiliki persamaan pada sumber data sama-sama menggunakan data primer dan	Penelitian ini memiliki perbedaan pada Teknik yang digunakan yaitu

		akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sideman kabupaten karangasem	kompetensi perangkat desa tidak memiliki tidak berpengaruh positif atau signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dihasilkan ($0,036 < 0,005$) mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten Indragiri hulu, Sedangkan partisipasi masyarakat menghasilkan sebesar ($3,765 < 0,05$), mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	pada Teknik Penelitaian sama -sama menggunakan teknik analisis deskriptif, uji kualitas data uji asumsi dan uji hipotesis.	pengujian korelasi dan juga pada penelitian ini tidak melakukan pengujian regresi
3	Siti sarah,	Pengaruh Kompetensi	Hasil penelitian ini menyimpulkan	Memiliki kesamaan	Memiliki perbedaan

	Taufeni Taufik, Devi Safitri	perangkat desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan sideman kabupaten karangasem	bahwa hasil analisis kompetensi aparatur desa sebesar $(0,000 < 0,05)$, mengindikasikan bahwa kompetensi apatur memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu. Sedangkan Komitmen organisasi dihasilkan $(0,030 < 0,005)$, Mengindikasikan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh positif atau positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiri hulu, sedangkan Pemanfaatan teknologi informasi dihasilkan $(0,001 < 0,005)$, mengindikasin bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan	pada sumber data yang menggunakan sumber data primer dan juga melakukan uji reabilitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji multikoloniaritas variabel (X1), (X5) dan Variabel (Y)	pada Variabel tidak melakukan pengujian secara simultan dan juga tidak melakukan pengujian regresi.
--	---------------------------------------	--	---	---	---

			<p>terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten indragiti hulu, sedangkan partisipasi masyarakat menghasilkan bahwa $(0,013 < 0,005)$, mengindikasin bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dana desa kabupaten indragiri hulu, dan SPI menghasilkan bahwa $(0,001 < 0,005)$, mengindikasikan bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dan desa di kabupaten indragiri hulu.</p>		
--	--	--	--	--	--